

<b>Accepted:</b> Juni 2020	<b>Revised:</b> Agustus 2020	<b>Published:</b> Oktober 2020
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

**Bantuan Langsung Tunai Pemerintah  
(Studi Komparatif Pemerintahan Republik Indonesia dan  
Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab RA)**

**Muhamad Wildan Fawa'id**

IAIN KEDIRI, Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri

Email: [wildanfawa'id@iainkediri.ac.id](mailto:wildanfawa'id@iainkediri.ac.id)

***Abstract***

*This research aims to examine the extent of differences in cash direct aid practices during the time of Caliph Umar Bin Khattab RA and the government of the Republic of Indonesia. The method used in this study is a qualitative descriptive research method. This study interprets and describes the data related to the situation that is going on, attitudes and views that occur in a society. The researchers concluded that direct cash assistance had been done by Caliph Umar ibn Khattab 1400 years ago. What Caliph Umar ibn Khattab did was actually not far from what the Prophet (PBUH) did, which was to house the orphans, to the poor who included 8 asnab, by optimizing the state income from zakat and taxes. More complicated in Indonesia which is 80% income from taxes and does not optimize zakat. Indonesia also conducted BLT but not as successful as caliph Umar bin Khattab.*

***Keywords:*** *Cash Direct Assistance, Government, Caliph.*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana perbedaan praktek bantuan langsung tunai pada zaman khalifah Umar Bin Khattab RA dan pemerintahan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan langsung tunai ternyata sudah pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab 1400 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebenarnya tidak jauh dari apa yang dilakukan

Rasulullah SAW yaitu menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin yang termasuk 8 asbab, dengan mengoptimalkan pemasukan negara dari zakat dan pajak. Lebih rumit di Indonesia yang 80 % pendapatan dari pajak dan tidak mengoptimalkan zakat. Indonesia juga melakukan BLT namun belum sukses zaman Khalifah Umar bin Khattab.

**Kata Kunci:** *Bantuan Langsung Tunai, Pemerintah, Khalifah.*

## **Pendahuluan**

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama periode 1976-1996 (Repelita II - V), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis; dari 40% di awal Repelita II menjadi "hanya" 11% pada awal Repelita V. Catatan gemilang tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Laporan World Bank yang bertajuk: "The East Asian Miracle", misalnya, menempatkan Indonesia menjadi salah satu macam Asia dalam daftar "The High Performing Asian Economies (HPAEs)" sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura.<sup>1</sup>

Ingin mengulangi hal yang sama pemerintah Indonesia mulai gencar menggulirkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan, diantaranya program itu adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya,

---

<sup>1</sup>Erwan Agas Purwanto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 10, Nomor 3, Maret 27.

program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

Menurut data yang di rilis oleh BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.<sup>2</sup>

Berbeda dengan zaman awal pemerintahan Islam pasca Rasulullah SAW, pada saat kepemimpinan sahabat Khalifah Umar bin Khatthab RA. Pemerintahan Islam mampu memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada ahli bait dan sahabat-sahabat nabi sesuai dengan kontribusi mereka dalam menyebarkan agama Islam. Tidak ada kriteria kaya dan miskin, semua rakyat diberikan hak-haknya oleh negara. Hal ini sangat menarik bagi kami, karena pemerintahan Islam pada masa itu tidak secanggih sekarang namun kehidupan mereka lebih sejahtera, dibandingkan dengan pemerintahan kita hari ini yang semua akses informasi sebegitu mudahnya namun belum bisa menandingi kesejahteraan masa itu.

---

<sup>2</sup> *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.<sup>3</sup>

Objek penelitian dalam hal ini adalah Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Indonesia dengan BLT yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA.

Metode yang kami gunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Kami menggunakan data data sekunder dari web dan jurnal penelitian.

## **Pembahasan**

Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama *Bolsa Escola* dan berganti nama menjadi *Bolsa Familia*. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh *Luiz Inácio Lula da Silva*, presiden Brasil ke-35. *Bolsa Familia* masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. Pada tahun

---

<sup>3</sup> Thorin, Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2012), 1

2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu.<sup>[8]</sup> Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.<sup>4</sup>

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

No	Uraian	BLT 2005	BLT 2008
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dasar Peraturan	Inpres no: 12 tahun 2005	Inpres no: 3 tahun 2008
2	Penerima Manfaat	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Rumah Tangga Sasaran (RTS)
3	Jumlah Bulan	12 bulan	7 bulan
4	Periode Pembayaran	4 kali	2 kali
5	Nominal Pembayaran	Rp 300.000,-/periode	Rp 300.000,- dan Rp 400.000,-
6	Verifikasi Data	BPS	PT. Pos Indonesia

Sumber : BPS tahun 2006 dan Departemen Sosial 2008

<sup>4</sup> Inayati Nuraini Dwiputri, *The Impact Of The Unconditional Cash Transfer Program (Blt) On Cigarette Consumption In Indonesian Society*, Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 32, Number 2, 2017, 138 – 150

Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data nama nominasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan diberikan bantuan, pembagian kartu BLT, pencairan dana, dan terakhir pembuatan laporan dan evaluasi. Mekanisme pembagian BLT yang terstruktur baru diberlakukan pada tahun 2008, dan mekanisme ini tetap digunakan pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2013 penyelenggaraan BLT tidak lagi menggunakan kartu, melainkan langsung dengan kartu penerima beras miskin (raskin). Rincian kerja dan mekanisme BLT adalah:

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Sosial bersama dengan elemen masyarakat lainnya seperti kepala pemerintah di daerah-daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Setelah nama dan alamat para nominasi penerima BLT terdaftar, selanjutnya data dikirimkan ke PT Pos Indonesia untuk diproses.
3. Selesai diproses, kartu penerima BLT dicetak dengan tanda tangan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya kartu-kartu tersebut dikirim kembali ke kantor kelurahan masing-masing untuk dicek, setelah itu baru dibagikan.
4. Kartu yang telah dimiliki dapat digunakan untuk meminta pencairan dana BLT di Kantor Pos atau di tempat-tempat tertentu sesuai jadwal masing-masing. Jika kartu BLT hilang atau data tidak sesuai, warga tetap bisa meminta dengan bukti berupa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Surat Keterangan dari Kelurahan. Tetapi kartu asli tanda terima BLT tetap tidak bisa diganti.
5. Terakhir, BLT yang telah berjalan tiap bulannya akan dievaluasi dan diperiksa oleh tim khusus dan hasil laporannya dikirim ke Departemen Sosial.

BLT diakhiri dan diganti oleh pemerintah dengan menggulirkan Program Beras Miskin (Raskin) yang kemudian menjadi Beras Sejahtera (Rastra) dan sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM, yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan,

memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.<sup>5</sup>

Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dirubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan : Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD, Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP, Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK

Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional : Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia..<sup>6</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga

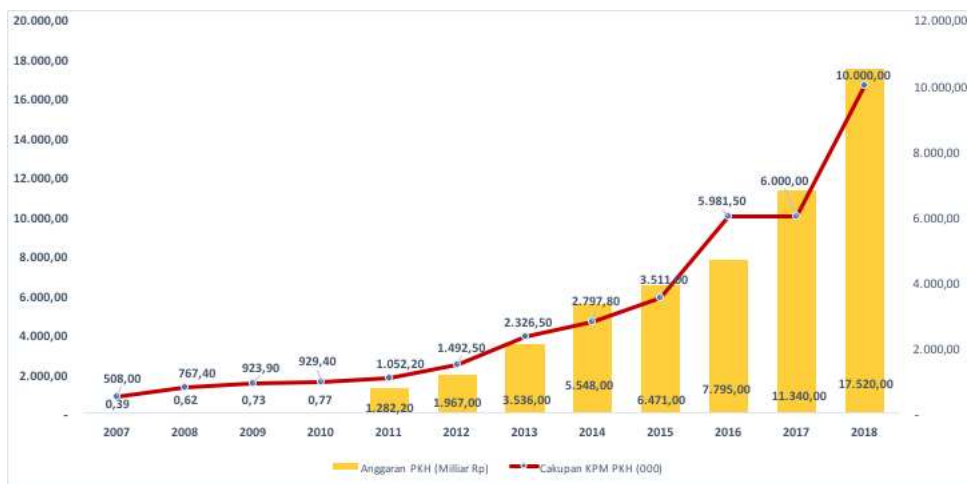
---

<sup>5</sup> Program Bantuan Sosial untuk Rakyat, Kominfo.go.id.

<sup>6</sup> Program Bantuan Sosial untuk Rakyat, Kominfo.go.id.

mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).<sup>7</sup> Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.



<sup>7</sup> Apa itu program Keluarga Harapan, [www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)

1. Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target beneficiaries dan alokasi budget PKH, melampaui baseline target perencanaan
2. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
3. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
4. Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
5. Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga**

1. Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
2. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

**B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH**

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-
4. SMP : Rp. 1.500.000,-
5. SMA : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga

## Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab, RA

Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khatthab mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan di-jalankannya. Adapun yang menjadi dasar kebijakan ekonomi Umar bin Khatthab adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Negara Islam mengambil kekayaan umum yang benar dan tidak mengambil hasil dari *kharaj* atau harta fa'I yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
2. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya, dan Negara menambah-kan subsidi serta menutup hutang.
3. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor.
4. Negara menggunakan kekayaan dengan benar

Pemerintahan Umar bin Khatthab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taraf per-ekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (*ghonimah*), pajak tanah (*kharaj*), pajak perdagangan/bea cukai (*usyur*), zakat, pajak tanggungan (*jizyah*).<sup>9</sup>

Beberapa kebijakan Umar bin Khattab RA

1. Baitul Maal ( Dana Cadangan, Dibagi kepada Rakyat dan Gaji pegawai Baitul maal)
2. Semua *Kharaj* (Pajak Tanah) adalah *Fay'* (Pajak tanah rampasan perang) walau pemilik sudah memeluk Islam, tidak bisa diganti *Ushr* dan pemberlakuan setiap daerah berbeda-beda, sesuai keadaanya)
3. *Ushr* (Bea Cukai 2,5% untuk muslim dan 5% untuk kafir *Dzimmi* dan 10% untuk kafir Harbi dengan anggapan nilai barang melebihi dua ratus dirham dan tidak mengambil dua kali dalam setahun untuk barang yang diperbaharui)

---

<sup>8</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 20.

<sup>9</sup> Rizal Fahlefi, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, JURIS Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014).

4. Shodaqoh untuk Non Muslim (Dengan syarat tidak memaksakan kepercayaan Kristen Bani Taghlibi).
5. Zakat ( Penetapan zakat perdagangan kuda sebesar satu dinar atau satu dirham setiap empat puluh dirham). Dinar (Bobot Dinar = 1 mistqal = 20 qirat = 100 grain barley atau 10 Dirham = 7 dinar = 4,25 gram emas). Dirham ( 14 Qirat = 70 grain barley = 3,2 gram).

**Tabel beberapa jenis pendapatan dan pengalokasiannya.**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>TUJUAN PENGGUNAAN</b>
1	Zakat dan Ushr	Distribusi lokal, bila berlebih dikirim ke Pusat Baitul Maal (Madinah)
2	Khums dan Shadaqah	Fakir miskin dan siapa saja pencari kesejahteraan baik muslim maupun non muslim
3	Kharaj, Fai', Jizyah, Ushr (Bea Cukai)	Jaminan Pensiun, Biaya operasional Militer dan administrasi
4	Pendapatan Lain	Gaji pekerja, Santunan anak terlantar dan Dana sosial

**Tabel Nominal Bantuan per Tahun dan pengalokasiannya.**

<b>JUMLAH PEMBERIAN</b>	<b>Dalam Rupiah (50.000)</b>	<b>PENERIMA BANTUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
12.000 Dirham	600 Jt	Bagi Istri Nabi	
12.000 Dirham	600 Jt	Abbas Paman Rosulullah SAW	
5000	250 jt	Muhajirin dan	Termasuk Hasan

<b>JUMLAH PEMBERIAN</b>	<b>Dalam Rupiah (50.000)</b>	<b>PENERIMA BANTUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Dirham		Anshar yang ikut perang Badar	dan Husein
4.000 Dirham	200 jt	Bagi mereka yang Islam seperti keislaman penduduk Badar	Termasuk Utsman bin Zaid
2.000 Dirham	100 jt	Putra kaum Muhajirin dan Anshor	Pengecualian untuk Abu Salamah 3.000 Dirham karena keutamaan Ummu Salamah
800 Dirham	40 jt	Penduduk Makkah	Kecuali Nadzar bin Anas 200 dirham

Sungguh luar biasa perhatian Umar bin Khattab RA kepada masyarakatnya. Selain manajemen pendapatan negara dan mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, Umar bin Khattab juga mampu memberikan tunjangan kepada pendudukan Makkah dan Madinah, yang bila di hitung masih besar tunjangan pada masa Umar bin Khattab RA daripada yang diterima oleh keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini. Pada zaman Umar bin Khattab untuk tunjangan terkecil 800 dirham atau setara 40 juta dengan asumsi 1 dirham = 50.000,-. maka penduduk Makkah dan Madinah mendapat jatah sebesar Rp. 3.300.000,- setiap bulan. Lebih besar dari UMK Kota Kediri yang sebesar Rp. 2.060.925.<sup>10</sup> Padahal sekarang 1 Dirham Antam senilai Rp. 82.162<sup>11</sup>. Bandingkan dengan keluarga penerima PKH bila dihitung mereka mendapat per tahun Rp. 7.350.000 dan per bulan sebesar Rp. 612.000,-.

Masa Khalifah Umar bin Khattab belum ada kategorisasi seperti pada masa sekarang. Pemerintah pada masa sekarang menggunakan 14 kriteria kemiskinan, yaitu :<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Adi Nugroho, *Usul UMK Kediri Jadi Rp 2 Juta*, radarkediri.jawapos.com, 04 November 2019

<sup>11</sup> Koin Dirham Ag. 99.95%, [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com), 08 Januari 2020

<sup>12</sup> 14 Kriteria Kemiskinan, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kriteria yang menurut beberapa pihak tidak bisa memberikan gambaran kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia tidak bisa diukur dari luas tanah dan beras saja.<sup>13</sup> Berbeda dengan zaman Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan tunjangan berdasarkan kontribusi mereka terhadap syiar Islam, Umar bin Khattab belum melihat kemampuan finansial penerima tunjangan itu, antara layak dan tidak layak mendapatkan bantuan. Umar bin Khattab belum sempat melakukan kategorisasi yang lebih mendalam sampai akhirnya wafat lebih dahulu ditangan Abu Lulu Fairus al Farsasi seorang beragama Majusi.

---

<sup>13</sup> Cara-cara Mengukur Tingkat Kemiskinan selain dengan Metode BPS, [www.Tirto.id](http://www.Tirto.id). 08 Januari 2019.

Negara kita Indonesia lebih kaya dari pada negara zaman Khalifah Umar bin Khattab RA. Akses informasi lebih hebat, Pendidikan masyarakatnya lebih baik, sumber daya alam nya luar biasa, seharusnya bangsa kita lebih baik dari pada zaman Khalifah Umar bin Khattab RA yang sama-sama mengoptimalkan pemasukan negara dari pajak. Namun mental dari pejabat dan berbagai oknum yang tidak bernurani masih merajalela di negeri ini.

## **Penutup**

Bantuan Langsung Tunai yang pertama kali di laksanakan di Brazil dan sukses, lalu ditirukan oleh negara-negara lain salah satunya di Indonesia, ternyata sudah pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA 1400 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA sebenarnya tidak jauh dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin yang termasuk 8 asnab, dengan mengoptimalkan pemasukan negara dari zakat dan pajak. Lebih rumit di Indonesia yang 80 % pendapatan dari pajak dan tidak mengoptimalkan Zakat. Indonesia juga melakukan BLT namun belum sesukses zaman Khalifah Umar bin Khattab RA.

## **Daftar Pustaka**

14 Kriteria Kemiskinan, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Adi Nugroho, *Usul UMK Kediri Jadi Rp 2 Juta*, [radarkediri.jawapos.com](http://radarkediri.jawapos.com), 04 November 2019

Apa itu program Keluarga Harapan, [www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)

Cara-cara Mengukur Tingkat Kemiskinan selain dengan Metode BPS, [www.Tirto.id](http://www.Tirto.id). 08 Januari 2019.

Erwan Agas Purwanto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 10, Nomor 3, Maret 27.

Inayati Nuraini Dwiputri, *The Impact Of The Unconditional Cash Transfer Program (Blt) On Cigarette Consumption In Indonesian Society*, Journal of

Indonesian Economy and Business, Volume 32, Number 2, 2017, 138 – 150

Koin Dirham Ag. 99.95%, [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com), 08 Januari 2020.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 20.

*Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009). (PDF).

*Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

*Program Bantuan Sosial untuk Rakyat*, [Kominfo.go.id](http://Kominfo.go.id).

Rizal Fahlefi, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, JURIS Volume 13, Nomor 2 (Desember 2014).

Thorin, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta:PT.Grafindo Persada, 2012), 1

Copyright © 2020

**EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam**

e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam is the property of EL- Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

**EL-Faqih**, Vol. 6, No. 2, Oktober 2020